

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bersekolah merupakan satu pengalaman kolektif yang dialami oleh sebagian besar anak di seluruh dunia dan merupakan cara bagi masyarakat untuk mempersiapkan anak-anak mereka menghadapi masa depan (Bappenas dkk., 2015; UNICEF, 2006). Oleh karena itu, sekolah harus berfokus pada anak secara keseluruhan, yakni mempertimbangkan kondisi dalam keluarga atau masyarakat yang mungkin menghambat kemajuan pendidikannya. Sekolah juga harus mampu membantu anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir dan bernalar, membangun harga diri dan rasa hormat terhadap orang lain, serta mencapai potensi penuh mereka sebagai individu, anggota masyarakat, dan warga dunia (Pandey, 2019; Settelmaier, 2003). Dengan demikian, menyediakan sekolah yang aman dan protektif yang memiliki staf guru terlatih yang memadai, dilengkapi dengan sumber daya yang memadai, dan kondisi yang sesuai untuk belajar adalah sebuah tugas penting. Dengan menyadari bahwa setiap anak menghadapi keadaan yang berbeda dan memiliki kebutuhan yang berbeda, sekolah yang peka terhadap perbedaan dibangun berdasarkan bekal yang dibawa anak-anak dari rumah dan masyarakat agar dapat mengimbangi kekurangan di lingkungan rumah dan masyarakat.

Tantangan dalam pendidikan bukan hanya untuk menyekolahkan anak-anak, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas sekolah secara keseluruhan dan mengatasi ancaman terhadap partisipasi, baik masyarakat dan orang tua, guru dan warga sekolah, maupun peserta didik (Benjamin, 1986; Dewey & Hinchey, 2018; Kohlberg, 1975; Lind, 2006). Aturan dan peraturan yang adil, demi kepentingan terbaik anak-anak, diterapkan secara transparan, demokratis, tidak mengakibatkan penghinaan atau penindasan terhadap peserta didik, tidak melemahkan otoritas guru dan pihak sekolah, serta tidak mengasingkan sekolah dari masyarakat yang dilayani (UNICEF, 2006). Pada kenyataannya, sekolah tidak selalu menjadi pengalaman yang positif bagi anak-anak. Sekolah juga dapat diartikan sebagai ketakutan terhadap ancaman

hukuman, penghinaan, perundungan, atau bahkan kekerasan dari guru dan sesama peserta didik (Machmudi, 2024; New Indonesia, 2024a, 2024b; Setyawan, 2017; Wulandari, 2024). Keadaan ini akan semakin buruk jika peserta didik tidak memiliki guru yang kompeten untuk membimbing mereka, buku pelajaran untuk dipelajari atau buku latihan untuk menulis, atau jika mereka memiliki buku pelajaran dengan kualitas yang buruk yang memperkuat stereotip yang merugikan.

Kondisi iklim sekolah yang buruk seperti itu dapat dengan mudah memosisikan peserta didik ke dalam stereotip. Sering kali kita mendengar bahwa peserta didik yang merokok, mengikuti tawuran, bolos mata pelajaran, menyontek, dan perilaku lainnya yang dilabeli sebagai kenakalan dan pelanggaran tata tertib merupakan tindakan yang sepenuhnya berasal dari individu peserta didik. Kita tidak pernah mencoba untuk melihat kondisi ini sebagai sebuah puncak gunung es yang memiliki bongkahan es lebih besar di bagian dalam lautan. Dengan kata lain, banyak sekolah yang langsung melabeli peserta didik tersebut dengan 'peserta didik bermasalah' dan mencetaknya sebagai seseorang yang sesuai dengan tatanan moral masyarakat, tata tertib, atau yang lebih buruk dari hal itu, yakni citra sekolah di mata masyarakat melalui pembinaan atau pendisiplinan dengan dalih pendidikan moral (Bardziński & Szopka, 2011; Lind, 2016; Pandey, 2019). Ada kalanya tata tertib atau peraturan yang dibuat oleh sekolah tidak mempertimbangkan sudut pandang anak dalam penyusunannya, bahkan dalam penerapannya sering kali dijadikan dasar untuk memberikan hukuman kepada peserta didik. Anak yang berada dalam keadaan berisiko sehingga melakukan pelanggaran tata tertib sekolah langsung mendapatkan hukuman yang terkadang termasuk ke dalam tindakan kekerasan verbal bahkan fisik. Padahal masih ada proses yang perlu disadari oleh pihak sekolah sebelum memberikan vonis hukuman pendisiplinan, yaitu penalaran moral dari tindakannya.

Penalaran moral (*moral reasoning*) menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tindakan moral (*moral conduct*), baik tindakan yang dikatakan baik/benar maupun tindakan yang dikatakan buruk/salah (Bar-Yam dkk., 1980; Candee & Kohlberg, 1987; Colby dkk.,

1983; Ibda, 2023; Kohlberg, 1975). Sekolah acapkali mengabaikan proses ini sehingga tidak bisa menghadirkan partisipasi anak dalam memberikan pandangannya mengenai keputusan pemilihan tindakan yang dilakukannya sehingga membuat peserta didik tidak terbiasa untuk melakukan hal ini dan mendorongnya untuk berbohong atau mencari jalan pintas lainnya agar meringankan hukuman yang mungkin akan ia terima. Padahal, pendidikan yang berpusat pada anak lebih mungkin menghasilkan pemikir independen yang dapat memberikan kontribusi konstruktif bagi demokrasi partisipatif dan beradaptasi dengan keadaan yang dinamis (Dewey & Hinchey, 2018; Lind, 2016; Nussbaum, 2016; Steć dkk., 2021). Keterlibatan anak dalam proses belajar dan mengajar di kelas ataupun sekolah menjadi aspek yang sangat penting karena melalui proses interaktif yang memungkinkan anak-anak turut aktif dalam mengamati, mengeksplorasi, mendengarkan, bernalar, bertanya, dan menemukan pengetahuan membantunya untuk memiliki keterampilan pengambilan keputusan tindakan moral yang tepat (Gillett-Swan dkk., 2023; Harcourt & Einarsdottir, 2011; Kohlberg & Hersh, 1977; J. R. Rest, 1988). Dengan demikian, pendidikan yang berpusat pada anak juga akan memungkinkan guru untuk meningkatkan status profesional mereka sebagai fasilitator pembelajaran, penjaga kesejahteraan anak-anak saat mereka berada di sekolah, dan figur otoritas dalam pengelolaan hubungan antara sekolah dan masyarakat.

Pada dasarnya, kasus kenakalan atau pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh peserta didik dapat dilihat menggunakan kacamata keilmuan dengan apa yang kita kenal sebagai teori psikososial milik Erik Homburger Erikson yang menjelaskan perubahan sistematis selama rentang hidup menggunakan enam konsep dasar: 1) tahapan perkembangan; 2) tugas perkembangan; 3) krisis psikososial; 4) proses sentral untuk menyelesaikan krisis pada setiap tahap; 5) jaringan hubungan yang signifikan; dan 6) mengatasi, yakni proses saat seseorang menghasilkan perilaku baru untuk menghadapi tantangan baru (Erikson, 1982; Newman, 2015; Simanjuntak, 2009). Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) merupakan bentuk dari tahap identitas vs. kekacauan identitas (*identity vs role confusion*) yang terjadi

selama rentang usia 12 – 18 atau masa remaja awal. Pada rentang usia ini, terdapat beberapa tugas perkembangan, yaitu pematangan fisik, operasi formal, perkembangan emosional, keanggotaan dalam kelompok sebaya, serta hubungan romantis dan seksual (Erikson, 1982; Newman, 2015; Simanjuntak, 2009). Tugas perkembangan berupa keanggotaan dalam kelompok sebaya inilah yang mendorong seorang peserta didik terlibat dalam kenakalan remaja.

Guru BK dengan pendekatan komunikasi interpersonalnya dapat menggali lebih dalam mengenai apa yang peserta didik pikirkan, rasakan, ataupun hadapi saat ia melakukan pelanggaran. Sesuatu yang dikatakan benar atau salah, baik atau buruk, masih sangat bisa diperdebatkan dari berbagai sudut pandang. Melalui kegiatan mendengar secara aktif mengenai cara berpikir atau penalaran peserta didik berdasarkan argumen-argumen yang disampaikannya, Guru BK dapat menganalisis dan mengidentifikasi sejauh apa kesalahan dan/atau keburukan yang peserta didik lakukan dari pelanggaran yang dilakukannya (Flavell & Piaget, 1963; Zeidler, 2003). Dengan kata lain, Guru BK secara hati-hati melihat isi argumen yang dikemukakan oleh peserta didik untuk melihat penalaran moralnya (*moral reasoning*) dari tindakan moral (*moral conduct*) yang dilakukannya.

Contoh masalah mengenai pengambilan keputusan yang peneliti temukan saat melaksanakan Praktik Keterampilan Mengajar (PKM) di sebuah SMP di Jakarta ialah terdapat seorang peserta didik yang berada dalam risiko pada kenakalan remaja seperti merokok dan saat hal itu dilaporkan kepada Guru BK, ternyata peserta didik tersebut menjelaskan bahwa ia merokok agar dapat menutupi kesedihan dan kedukaan yang ia rasakan tatkala mengingat kondisi bahwa kini ayahnya telah meninggal dunia dan ibunya harus bekerja di usianya yang tak lagi produktif. Rasa sedih dan duka yang ia alami semakin diperparah karena kini ia tidak sepenuhnya mendapatkan peran ibunya yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Kemudian, setelah orang tua peserta didik tersebut ditemui, ibunya menjelaskan bahwa dahulu peserta didik tersebut merupakan anak yang berprestasi di cabang olahraga, tetapi kini ia tidak lagi bersemangat untuk mengikuti latihan pasca ayahnya meninggal dunia.

Tak dapat dipungkiri bahwa pengambilan keputusan selalu terjadi sepanjang kita hidup, mulai dari hal yang penting hingga yang terkesan sepele. Oleh sebab itu, peneliti juga menemukan bahwa masalah pengambilan keputusan juga terjadi pada peserta didik jenjang SMA atau SMK. Misalnya, keputusan peserta didik SMA yang harus memilih antara menuruti perkataan orang tua untuk melanjutkan studi di Ilmu Kedokteran atau tetap berpegang teguh melanjutkan studi di Ilmu Budaya. Bahkan, pada peserta didik SMK semakin banyak keputusan moral yang harus dibuat. Contohnya ialah peserta didik SMK yang berada pada jurusan Multimedia, Animasi, Rekayasa Perangkat Lunak, atau Desain Komunikasi Visual yang berasal dari latar belakang sosioekonomi menengah ke bawah harus mengambil keputusan antara tetap menggunakan perangkat lunak bajakan (dengan menggunakan *crack*) atau harus menyisihkan uangnya untuk berlangganan yang tentunya tidak murah untuk kalangan peserta didik SMK. Tak hanya itu, misalnya ketika peserta didik SMK sedang dalam program magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang menemukan dirinya harus memilih antara menolak perintah atasan untuk tidak membuat dokumen yang dipalsukan atau tetap menerima perintah itu karena ia hanyalah seorang peserta didik SMK yang sedang magang. Tentunya, kondisi ini mengarah pada dilema moral yang akan menentukan pengambilan keputusan moralnya.

Berdasarkan hal tersebut, semestinya sekolah dapat memfasilitasi penguasaan keterampilan pengambilan keputusan moral sehingga membantu peserta didik menghadapi dilema moral dalam berbagai konteks kehidupannya. Hal yang tak kalah pentingnya apabila ingin mendorong peserta didik untuk mengikuti tata tertib dan peraturan sekolah ialah membantunya untuk mencapai perkembangan moral yang sesuai tahapan usianya. Dengan kata lain, sekolah tidak perlu mencekoki peserta didik dengan orientasi ‘meminta untuk menjadi’ melainkan ‘mengajarkan untuk menjadi’ individu yang mampu melakukan tindakan moral yang baik dan benar (Dais, 1971). Kesadaran ini telah mendorong UNICEF untuk mengadvokasi agar negara-negara mengadopsi Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai model kualitas komprehensif dalam rencana dan prioritas pendidikan

nasional tiap negara. Model Sekolah Ramah Anak (SRA) mendorong setiap peserta didik untuk selalu menemukan pengetahuan baru untuk diperoleh, keterampilan baru untuk dikuasai, fakta baru untuk dipelajari, emosi baru untuk dialami, ide baru untuk dijelajahi, teka-teki baru untuk direnungkan, dan cara baru untuk memahami. Baik sekolah maupun ruang belajar informal, lingkungan memainkan peran penting dalam pengembangan potensi anak (UNICEF, 2006). Pihak-pihak yang menjadi 'pemikul tugas' ini ialah orang tua, masyarakat, guru, kepala sekolah, perencana pendidikan dan kelompok masyarakat sipil, pemerintah daerah dan pusat, serta mitra eksternal yang terkait.

Sekolah dapat melibatkan Guru Bimbingan dan Konseling untuk menjadi garda terdepan atas isu ini. Guru BK yang selama ini secara tidak langsung 'ditugaskan' untuk menghukum peserta didik dengan dalih pendisiplinan atau pendidikan karakter, kini dapat proaktif menjembatani antara peserta didik, orang tua dan masyarakat, serta sekolah. Secara profesional, Guru BK mampu melakukan asesmen, melaksanakan layanan berbasis pencegahan dan penanganan di berbagai skala (individu, kelompok, kelas), melakukan komunikasi interpersonal kepada orang tua, dan berbagai hal lainnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jika guru mata pelajaran memiliki Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dalam ranah BK terdapat Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik Peserta Didik (SKKPD) yang berisi 10 aspek perkembangan, misalnya landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, dan kesadaran tanggung jawab sosial.

Dapat dikatakan bahwa pengoptimalan layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah dapat dilakukan sebagai upaya untuk mendorong peserta didik mencapai tugas perkembangan dan perkembangan moral sesuai dengan tahapannya sebagai pencapaian layanan dari Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik (SKKPD). Melalui latihan cara berpikir yang tepat, komunikasi asertif, partisipasi aktif, dan pemahaman yang jernih tentang apa yang baik/buruk dan benar/salah maka aspek perkembangan seperti landasan

perilaku etis, kematangan emosi, kematangan sosial, kesadaran tanggung jawab sosial, dan kematangan hubungan teman sebaya dapat diupayakan untuk dicapai. Dalam lingkup perhatian besar, layanan bimbingan klasikal atau kelas besar dapat digunakan. Layanan bimbingan klasikal memungkinkan semua peserta didik dalam satu kelas untuk mendapatkan perhatian dengan setara. Selain itu, pemberian layanan bimbingan secara klasikal berarti berorientasi pada kebutuhan pencegahan dari kecenderungan terjerumus ke dalam kenakalan remaja bagi seluruh peserta didik, setidaknya dalam satu kelas. Sekolah dapat mengubah paradigma pemberian pendisiplinan peserta didik dari skorsing atau pembinaan yang berbasis hukuman menjadi pembinaan yang diarahkan pada akses secara langsung layanan BK. Adapun Guru BK dapat melakukan personalisasi pendekatan atau metode yang sesuai dengan isu ini, misalnya pengajaran menggunakan *dilemma pedagogy* dengan memberikan cerita tentang dilema moral dan mengangkat diskusi atas dilema tersebut.

Diskusi atas dilema moral dapat mendorong peserta didik yang terlibat kenakalan remaja dan yang tidak pernah terlibat sama sekali dalam kasus kenakalan remaja untuk sama-sama mengungkapkan pendapatnya. Setiap pendapat yang dikemukakan oleh peserta didik menunjukkan seberapa maju tahap perkembangan moralnya yang dapat dianalisis melalui konten atau isi argumentasinya (Jahja, 2011; Zeidler, 2003). Isi argumentasi inilah yang akan dianalisis untuk mengetahui penalaran moral (*moral reasoning*) peserta didik dan dapat dikontekstualisasikan pada teori perkembangan moral yang dikembangkan oleh Lawrence Kohlberg. Melalui metode dilema moral ini pula Guru BK dapat melihat apa yang penting bagi peserta didik, misalnya nilai dasar universal apa yang sebenarnya ingin ia penuhi sebagai wujud dari keterlibatan atau keanggotaan dalam kelompok sebaya (Darusti, 2018; Herjuno, 2017; Murdianto, 2019). Hasil dari layanan ini, selain bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai perkembangannya yang lebih optimal, juga membantu sekolah untuk menyusun kurikulum atau kegiatan pendukung kurikulum yang sudah ada sehingga dapat menyubstitusikan

pendidikan moral atau karakter peserta didik dari cara-cara yang maladaptif menjadi lebih adaptif.

Penelitian berkaitan dengan metode dilema moral dalam pendidikan masih belum banyak dikembangkan, terlebih dalam ranah bimbingan dan konseling. Selain itu, penggunaan metode dikusi dilema moral yang dalam hal ini ialah *Konstanz Method of Dilemma Discussion* (KMDD) sebagai metode layanan bimbingan klasikal untuk upaya pengembangan penalaran moral peserta didik membutuhkan perhatian khusus guna mengetahui kebermanfaatannya sebagai bukti empiris dari ketercapaian Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik (SKKPD). Untuk itu, perlu dilakukan penelitian mengenai **“Pengembangan Layanan Bimbingan Klasikal untuk Meningkatkan Kematangan Pengambilan Keputusan Moral Peserta Didik SMK dengan *Konstanz Method of Dilemma Discussion* (KMDD)”**. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi batu lompatan bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan metode dilema moral dalam layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, berikut merupakan identifikasi atas masalah yang hadir dari keadaan tersebut.

1. Masih ditemukan sekolah-sekolah yang tidak dapat mendorong pembelajaran transformatif kepada peserta didiknya;
2. Pembelajaran transformatif perlu diupayakan agar mempersiapkan peserta didik yang mampu menghadapi permasalahan dalam kehidupannya secara adaptif dan mandiri;
3. Peserta didik yang bermasalah atau melakukan pelanggaran diberikan hukuman dengan dalih pendidikan karakter atau moral, bukan dengan upaya yang membantunya mencapai tugas perkembangan usianya dan tahap perkembangan moralnya;
4. Kurangnya pelibatan Guru BK dengan berbagai layanannya dalam mewujudkan iklim sekolah yang memfasilitasi peserta didik untuk memiliki keterampilan pengentasan masalah; dan

5. Kurangnya partisipasi peserta didik selama proses pembelajaran (atau layanan) sehingga tidak dapat mengembangkan refleksi kritis peserta didik yang meningkatkan minat dan motivasinya untuk melakukan upaya perubahan diri karena masih belum banyak kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan penalaran moralnya di berbagai aspek kehidupan yang dijalaninya.

C. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah sebagai upaya untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini di antaranya:

1. Penelitian ini difokuskan pada bidang keilmuan bimbingan dan konseling;
2. Pengembangan model layanan bimbingan klasikal dengan menggunakan *dilemma pedagogy*, khususnya menggunakan *Konstanz Method of Dilemma Discussion* (KMDD);
3. Pengembangan Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) Bimbingan Klasikal sebagai upaya untuk meningkatkan kematangan pengambilan keputusan moral; dan
4. Pengembangan Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) dilakukan untuk jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK).

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah “Bagaimana Pengembangan Layanan Bimbingan Klasikal untuk Meningkatkan Kematangan Pengambilan Keputusan Moral Peserta Didik SMK dengan *Konstanz Method of Dilemma Discussion* (KMDD)?”

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan *dilemma pedagogy* sebagai suatu model pelaksanaan layanan bimbingan klasikal di setiap jenjang pendidikan dan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan bahan ajar yang akan digunakan dalam layanan bimbingan klasikal sebagai upaya untuk meningkatkan penalaran moral dan kematangan pengambilan keputusan yang mendorong perkembangan moral ke tahapan yang lebih maju.